

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2016. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai permasalahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta.
- Bagir Manan. 2004. *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Chidir Ali. 1987. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- F.A.M. Stroink. 2006. *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung.
- Fariad Ali. 2015. *Teori Konsep Administrasi Dari Paradigmatik Menuju Redefinisi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Frederik Robert Bothlingk. 1954. *bet Leerstuk der Vertegenwoordiging en zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesie*. Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon 's-Gravenhage.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- J.B.J.M ten Berge. 1999. *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer.
- J.J.H. Brugging. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Terjemahan Bernad Arief Sidharta. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2015. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- M.A. Moegni Djojodiredjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan kedua, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Edisi Revisi, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, et.al. 2010. *Hukum Adiminstrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- _____, 2012. *Hukum Adiminstrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan. 2019. *Urgensi Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII-Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Salman Luthan. 2014. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, FH UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta..
- _____, 2014. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Y. Sogar Simamora. 2017. *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Bagi Penyedia.

III. Jurnal/Internet:

A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya menurut Pancasila dan UUD 1945*, Makalah pada Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis Universitas 17 Agustus Jakarta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus, Jakarta, 9 Juli 1994, diunduh tanggal 12 April 2023.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?*, Makalah pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema "Revitalisasi Peran Gubemur Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", Bandung, 02 Desember 2010.

Philipus M. Hadjon, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi atas Tindak Pemerintahan*, Makalah pada Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 28-30 Oktober 2008, diunduh tanggal 12 April 2023.

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dalam "Yuridika", Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hal. 3.// <https://www.researchgate.net/publication/301740825>. Diunduh tanggal 19 Oktober 2021.

Sintang, <https://www.pa-sintang.go.id/?sintang=detail&berita=3309&prosedur-pengadaan-barang-dan-jasa>. Diunduh tanggal 19 Oktober 2021.

<https://nasional.kontan.co.id/news/nilai-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-pada-2021-mencapai-rp-1214-triliun>.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220519/10/1534882/banggar-dpr-setujui-apbn-2022-naik-jadi-rp3106-triliun>.

<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>.

[https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengadaan,%2C%20dan%20\(6\)%20akuntabel](https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengadaan,%2C%20dan%20(6)%20akuntabel)

IV. Kamus:

Kamus KBBI V Offline.